

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan otonomi pembiayaan dalam mencapai mutu pendidikan di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan STAI Persis Bandung) yang telah diuraikan pada BAB IV, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembiayaan yang meliputi otonomi perguruan tinggi dalam menentukan jenis, sumber serta alokasi anggaran; 1) terdapat dua jenis bentuk Rencana Kerja Belanja (RKB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang keduanya sama-sama merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 2) Sumber anggaran perguruan tinggi pendapatan yang diterima dari; mahasiswa, masyarakat, pemerintah, lembaga mitra, donatur dan dunia usaha dunia industri. 3) Dialokasikan dengan komponen anggaran berdasar pada; SN Dikti dan Standar Melampaui SN Dikti, Program Kerja Prodi, Fakultas Dan Insitusi.
2. Sistem penganggaran meliputi: ketersediaan, otonomi manajemen pembiayaan dan distribusi pembiayaan pendidikan Perguruan Tinggi; 1) terdapat dua model ketersediaan anggaran perguruan tinggi yaitu model distribusi anggaran oleh badan penyelenggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran perguruan tinggi dan pengelolaan penggunaan anggaran oleh perguruan tinggi. 2) Sedangkan untuk otonomi pengelolaan perguruan tinggi ditemukan tiga model yaitu; *Pertama*, pembagian wewenang perguruan tinggi untuk pengembangan keilmuan, sedangkan kewenangan untuk membangun, memelihara dan mengembangkan sarana prasarana kampus merupakan kewenangan Yayasan. *Kedua*, otonomi manajemen pembiayaan yayasan; memberikan support system pengembangan sarana prasarana. *Ketiga*, Otonomi Perguruan Tinggi: mengembangkan keilmuan dan sarana prasarana pendukung

mutu perkuliahan dan berfungsi sebagai *Quality Control*. 3) Terdapat dua jenis sistem distribusi anggaran yaitu, sistem *Bottom Up* anggaran didistribusikan berdasarkan usulan dari pengguna anggaran baik itu program studi ataupun unit pelaksana lainnya dan sistem *Top Down* distribusi anggaran sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan oleh institusi dengan menggunakan sistem anggaran berbasis Teknologi Informasi Sistem.

3. Ditemukan otonomi sistem evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran;
  - 1) evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai, dilakukan pimpinan perguruan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk mengukur keterserapan anggaran.
  - 2) Laporan kegiatan laporan pertanggungjawaban secara periodik, laporan terdiri dari laporan yang disampaikan oleh pengguna anggaran dan laporan kinerja anggaran tahunan serta dilakukan audit oleh akuntan publik.
4. Capaian mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ditemukan perguruan tinggi telah memiliki standar mutu sesuai SN Dikti dan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan standar melampaui SN Dikti sesuai dengan target mutu visi masing-masing perguruan tinggi. Adapun sistem penjaminan mutu Sistem penjaminan mutu internal menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang dilaksanakan oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)/ BPM (Badan Penjaminan Mutu)/ dan SPME oleh LAM, BAN-PT, akreditasi internasional dan sertifikasi ISO 9001:2008. Adapun indikasi capaian mutu menggambarkan Mutu Input, Proses Dan Output, Capaian Standar Mutu dan capaian akreditasi dengan raihan peringkat akreditasi unggul dan baik sekali.
5. Otonomi pembiayaan pendidikan terhadap capaian mutu Perguruan Tinggi Dukungan anggaran terhadap pemenuhan mutu dituangkan dalam butir alokasi anggaran mengacu pada butir-butir anggaran sesuai dengan tuntutan standar mutu yang ditetapkan perguruan tinggi. Kebijakan pembiayaan berorientasi yang berorientasi pada capaian target kinerja dan skala prioritas capaian mutu. serta responsibility anggaran dalam memenuhi kebutuhan untuk merespon situasi terkini tuntutan mutu perguruan tinggi.

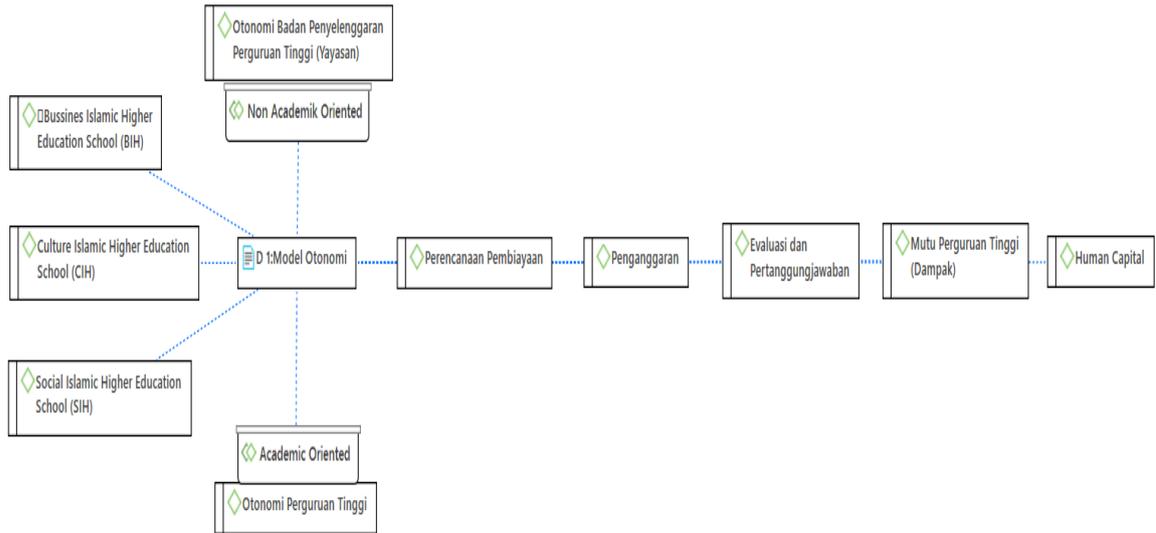
## B. Rekomendasi

Mengingat yang terjadi saat ini tuntutan mutu perguruan yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) berlaku bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan bentuk Universitas, Institut maupun Sekolah Tinggi. Kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan peran pendanaan pemerintah terhadap pembiayaan perguruan tinggi, dimana kontribusi pendanaan pemerintah dari pada tahun 2024 dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak lebih dari 1,6% dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 4.523 PTN dan PTS. Terjadi kesenjangan antara tuntutan mutu yang tinggi dengan dukungan yang rendah.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) berperan menyiapkan tenaga kerja terdidik yang berkualitas tinggi dan untuk mewujudkannya memerlukan dukungan anggaran pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan standar mutu lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

Maka dari itu salahsatu Solusi di tengah dinamika permasalahan PTKIS baik permasalahan keterbatasan anggaran serta lemahnya tata kelola perlu menentukan sebuah model otonomi pembiayaan berorientasi pada capaian mutu dengan mengadopsi salah satu bentuk model otonomi pembiayaan berikut;

1. *Bussines Islamic Higher Education School (BIH)*; PTKIS berbasis bisnis,
2. *Culture Islamic Higher Education School (CIH)* PTKIS berbasis budaya lingkungan lembaga pendidikan atau
3. *Social Islamic Higher Education School (SIH)* PTKIS berbasis sosial. Sehingga perguruan tinggi perlu bergerak pada pencapaian mutu dan berperan sebagai pencetak generasi emas (*human capital*). Berikut rekomendasi model otonomi pembiayaan perguruan tinggi dalam mencapai mutu pendidikan tinggi:



Gambar 5.1 Model Otonomi Pembiayaan Perguruan Tinggi dalam Mencapai Mutu Pendidikan Tinggi

